

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : UMMI WAHYUNI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 10 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

UMMI WAHYUNI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	27 Satker Kab/ Kota
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Jawa Barat	80
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa atau media social	100%
8.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
11.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
12.	Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Provinsi yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
13.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi yg menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu dan valid	100%
14.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku secara patuh dan tertib	100%

Program	Anggaran
1. 076.01.CQ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (APBN)	Rp. 16.720.855.000,-
2. 076.01.WA Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	Rp. 146.164.748.000,-
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pilkada Tahun 2024	Rp. 1.104.250.916.782,-
	Rp. 1.267.136.519.782,-

Bandung, 10 Februari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



UMMI WAHYUNI

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



ACHMAD SYAIFUDIN RAHADHIAN